



RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO





**PEMERINTAH KABUPATEN
MOJOKERTO**

**RENCANA
KERJA
(RENJA)**

**TAHUN
2023**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MOJOKERTO**

KATA PENGANTAR

Pembangunan adalah merupakan upaya perubahan kearah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat, dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan. Wujud dari pelaksanaan pembangunan secara konkrit antara lain direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah yaitu APBD.

Untuk melaksanakan tahapan pembangunan diperlukan dokumen perencanaan baik Jangka Menengah ataupun Jangka Pendek (satu tahun) untuk dokumen lima tahunan telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 – 2026, sedangkan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ketiga Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 menggambarkan program dan kegiatan serta anggaran indikatif selama satu tahun kedepan, Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja ini berfungsi sebagai acuan dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.

Demikian kami berharap dengan telah disusunnya Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja ini dapat memberikan arah pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja selama satu tahun kedepan.

Mojokerto, Pebruari 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MOJOKERTO


EDDY TAUFIQ, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19790804 199801 1 001

DAFTAR ISI

Halaman	
Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika penulisan	4
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu	6
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	11
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi OPD	13
Bab III Tujuan, sasaran, program dan kegiatan	16
3.1 Tujuan dan Sasaran OPD	16
3.2 Program dan kegiatan OPD	17
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	19
4.1 Usulan Program Kegiatan Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja	19
Bab V Penutup	22



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah proses yang direncanakan dalam rangka melakukan perubahan yang mengandung makna adanya kemajuan/perbaikan, pertumbuhan mencapai kondisi yang lebih baik dibanding keadaan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan dilakukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi empat pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, dan top-down/bottom up.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dan merupakan bagian dalam tahapan penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yang penyusunannya dimulai dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bertingkat mulai dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat kota. Perumusan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 mengakomodir program OPD, lintas OPD, dan program kewilayahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi dengan pembangunan nasional dan Pemerintah Jawa Timur, pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2023 diarahkan pada tema : “Pengembangan SDM dalam rangka peningkatan pelayanan kemudahan usaha dan stimulasi penguatan sektor

potensial untuk pertumbuhan berkualitas dan berdaya saing”.

Dokumen RKPD secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi, program serta menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya yang meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra OPD dan Renja OPD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RKPD), perencanaan pembangunan pada RKPD memuat hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan tahunan yang diambil dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam kaitannya dengan tema pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2023 serta mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 yang mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, Satpol PP menjadi salah satu pendukung dan menjadi bagian dalam mewujudkan misi Kabupaten Mojokerto yakni misi mewujudkan daya saing daerah yang kuat. Tujuan misi tersebut adalah menguatkan daya saing daerah untuk memajukan Kabupaten Mojokerto dengan sasaran terwujudnya daya dukung pengembangan usaha. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto, Satpol PP menjadi unsur pendukung prioritas pembangunan daerah untuk Tahun 2023 yakni dalam bidang kinerja aparatur dan birokrasi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto adalah Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Mojokerto untuk periode 5 (lima) tahun ke depan, yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Mojokerto, serta memuat arah kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Strategi Pembangunan

Daerah Kabupaten Mojokerto, Kebijakan Umum dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib di bidang Penegakan Perda, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan perlindungan masyarakat. Memperhatikan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang ketertiban, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang Penegakan Perda ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto merupakan implementasi diberlakukannya otonomi daerah atas tuntutan masyarakat yang menginginkan hidup mandiri tanpa ketergantungan pada Pemerintah Pusat serta mewujudkan penegakan Perda, ketenteraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto tersebut, maka untuk menjamin adanya konsistensi dan keterpaduan perencanaan program dan kegiatan perlu disusun Rencana Strategis SKPD yang merupakan rangkuman rencana program kegiatan pada Tahun 2021-2026. Dengan berpedoman pada RPJMD, selanjutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang memuat



visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD, maka perlu disusun rancangan Rencana Kerja (Renja) secara definitif sebagai dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Renja Satpol PP) Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun Keempat dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja (Renstra Satuan Pol PP) Tahun 2021 – 2026 dan merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023. Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, Renja Satuan Polisi Pamong Praja ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2020, selanjutnya Visi dan Misi tersebut menjadi visi dan misi daerah.

Oleh karena itu untuk mewujudkan perencanaan pembangunan secara menyeluruh, efektif dan efisien, maka perlu adanya rumusan tujuan yang jelas, faktual dan realistis.

Dalam restra Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (Ditjen PUM) pada Kementerian Dalam Negeri ada satu target terkait Satuan Polisi pamong Praja yang memerlukan dukungan provinsi dan Kabupaten/kota. Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan Satpol PP sesuai peraturan perundang undangan yang ditarget pada tahun 2014 sejumlah 33 provinsi, pada kenyataannya masih banyak provinsi yang kapasitas kelembagaannya Satpol PP belum sesuai perundangan yang berlaku termasuk juga kabupaten/kota masih banyak kelembagaannya Satpol PP belum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian pembangunan diperlukan fokus dan prioritas penanganan permasalahan yang spesifik dan mendasar. Penyusunan prioritas pembangunan mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta menyinergikan dengan rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Prioritas pembangunan pada RKPD 2023 disusun dengan mendasarkan dan memperhatikan pada tema dan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Jatim, yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Memperhatikan prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto untuk Tahun 2023, Satpol PP sebagai aparatur penegak peraturan perundang-undangan mengampu prioritas pembangunan dalam bidang Kinerja Aparatur dan Birokrasi. Hal tersebut sesuai dengan visi Satpol PP Kabupaten Mojokerto yakni menjadi institusi penegak peraturan perundangundangan yang profesional. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No,4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Negara RI Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum;
19. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman, Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050 3708 tahun 2020 Tentang Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Permendagri 70 tahun 201 ttg sipd;
25. Permen KLHK nomor 33 tahun 2016;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
28. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
29. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
30. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Tahun 2023 Satpol PP Kabupaten Mojokerto adalah :

- a. Sebagai bahan masukan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2023;
- b. Sebagai bahan penyusunan Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2023;
- c. Sebagai pedoman dan gambaran dalam mengimplementasikan tugas pokok serta fungsi Satpol PP Kabupaten Mojokerto dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai implementasi misi organisasi.

Tujuan disusunnya Renja adalah :

1. Menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2023;
2. Menentukan alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran;
3. Memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja bulanan, tribulanan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj);
4. Memudahkan pelaksanaan progam kerja dan kegiatan dalam mencapai sasaran.
5. Memberikan acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyusun program dan kegiatan periode 1 tahun pada tahun yang akan datang;
6. Memberikan acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode 1 tahun pada tahun yang akan datang;
7. Memberikan acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menentukan sasaran kegiatan periode 1 tahun pada tahun yang akan datang;
8. Memberikan acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode 1 tahun pada tahun yang akan datang;
9. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja periode 1 tahun pada tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 berdasarkan Permendagri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang penyusunan Renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kejadian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan, isu-isu penting penyelenggaraan, tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target, kinerja Renstra OPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi ulasan tentang usulan Rencana Kerja dan pendanaan OPD pada APBD tahun 2023. Disini terdapat program kegiatan yang sudah dianggarkan di Program dan kegiatan kinerja Renstra OPD Tahun 2021-2026.

2.

BAB V PENUTUP

Berisikan urusan penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2021 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dari APBD Kabupaten Mojokerto. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2021 Per Semester II Tahun 2021 adalah:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota (Per 31 Desember 2021)

Pencapaian kinerja Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target nilai 82,9 (A) capaian realisasinya adalah nilai 80,4 (A). Anggaran Rp. 8.536.997.641,00 capaian realisasi sebesar Rp. 7.273.067.127,00 (85,19%)

Kegiatan pada program ini meliputi :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indicator jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah target 0 dokumen anggaran sebesar Rp. 0,00 capaian realisasi sebesar Rp. 0,00 (0%)

Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah :

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indicator jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah target 8 dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 capaian realisasi sebesar Rp. 0,00 (0%)
- b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indicator jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah target 6 dokumen dengan anggaran sebesar Rp. 0,00 capaian realisasi sebesar Rp. 0,00 (0%)

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indicator jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah target 14 bulan anggaran Rp. 7.379.788.338,00 capaian realisasi adalah 14 bulan sebesar Rp. 6.379.094.484,00 (86,44%)

Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indicator jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN target 14 bulan anggaran Rp. 7.379.788.338,00 capaian realisasi adalah 14 bulan sebesar Rp. 6.379.094.484,00 (86,44%)
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indicator jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah target 170 orang anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00 capaian realisasi adalah 170 orang sebesar Rp. 354.152.000,00 (88,54%)

Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah :

- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan indikator jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya target 70 orang anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 capaian realisasi adalah 70 orang sebesar Rp. 97.461.000,00 (97,46%)
- b) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan indikator jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan target 100 orang anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 capaian realisasi adalah 100 orang sebesar Rp. 256.691.000,00 (85,33%)
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indicator jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah target 12 bulan dengan anggaran Rp. 324.209.303,00 capaian realisasi adalah 12 bulan sebesar Rp. 181.549.245,00 (56,00%)

Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah :

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indicator jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor target 12 bulan dengan anggaran sebesar Rp. 65.000.000,00 capaian realisasi adalah 12 bulan sebesar Rp. 52.918.383,00 (81,41%)
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indicator jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor target 10 unit dengan anggaran Rp. 50.000.000,00 capaian realisasi adalah 10 unit sebesar Rp. 46.646.000,00 (93,29%)

- c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indicator jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor target 10 kali dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 capaian realisasi adalah 10 kali sebesar Rp. 9.237.500,00 (92,38%)
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indicator jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan target 5 unit dengan anggaran Rp. 15.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 5 unit sebesar Rp. 12.823.500,00 (85,49%)
 - e) Penyediaan Bahan/Material dengan indicator jumlah Penyediaan Bahan/Material target 1 unit dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 1 unit sebesar Rp. 27.390.000,00 (91,30%)
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indicator jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi target 235 kali dengan anggaran Rp. 154.209.303,00 dan capaian realisasi 56 kali sebesar Rp. 32.533.862,00 (21,10%)
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indicator jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah target 7 unit dengan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 7 unit sebesar Rp. 67.987.700,00 (84,98%)
- Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah :
- a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indicator jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan target 3 unit dengan anggaran Rp. 60.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 3 unit sebesar Rp. 48.869.700,00 (81,45%)
 - b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indicator jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya target 4 unit dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 4 unit sebesar Rp. 19.118.000,00 (95,59%)
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indicator jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target 10 orang dengan anggaran sebesar Rp. 210.000.000,00 dan capaian

realisasi adalah 10 orang sebesar Rp. 164.110.640,00 (78,15%)

Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah :

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indicator jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat target 1 orang dengan anggaran Rp. 65.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 1 orang sebesar Rp. 39.966.840,00 (61,49%)
- b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indicator jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor target 9 orang dengan anggaran sebesar Rp. 145.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 9 orang sebesar Rp. 124.143.800,00 (85,62%)
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indicator jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target 45 unit dengan anggaran sebesar Rp. 143.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 45 unit sebesar Rp. 126.173.058,00 (88,23%)

Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah :

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indicator jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan target 22 unit dengan anggaran Rp. 78.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 22 unit sebesar Rp. 70.177.158,00 (89,97%)
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indicator jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan target 22 unit dengan anggaran sebesar Rp. 28.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 21 unit sebesar Rp. 22.959.900,00 (82,00%)
- c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indicator jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya target 26 kali dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 26 kali sebesar Rp. 9.870.000,00 (98,70%)
- d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan

indicator jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya target 1 unit dengan anggaran sebesar Rp. 27.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 1 unit sebesar Rp. 23.166.000,00 (85,80%)

2. Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum (Per 31 Desember 2021)

Pencapaian kinerja Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum anggaran Rp. 4.481.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 4.145.570.956,00 (92,51%) dengan Indikator adalah :

- Persentase pelanggaran Perda yang tertangani dengan target 90% realisasi 86,74%
- Prosentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan dengan target 90% realisasi 93,97%
- Persentase anggota Satlinmas yang terlatih dengan target 30% realisasi 28%

Kegiatan pada program ini meliputi :

- a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indicator jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota target 12 bulan dengan anggaran Rp. 3.581.000.000,00 realisasi adalah 12 bulan sebesar Rp. 3.364.888.166,00 (93,97%)

Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah :

- a) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan dengan indicator jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan target 100 kali dengan anggaran sebesar Rp. 1.250.000.000,00 dan capaian realisasi 98 kali sebesar Rp. 122.7864.840,00 (98,23%)
- b) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa dengan indicator jumlah Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa target 114

- kali dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 110 kali sebesar Rp. 966.421.300,00 (98,64%)
- c) Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota dengan indicator jumlah peserta Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota target 180 orang dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 180 orang sebesar Rp. 173.478.826,00 (69,39%)
 - d) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indicator jumlah peserta Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum target 234 orang dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 234 orang sebesar Rp. 486.683.400,00 (97,34%)
 - e) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia dengan indicator jumlah peserta Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia target 70 orang dengan anggaran sebesar Rp. 381.000.000,00 dan capaian realisasi 70 orang sebesar Rp. 322.049.000,00 (84,53%)
 - f) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indicator jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum target 54 kali dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 54 kali sebesar Rp. 97.665.000,00 (97,67%)
 - g) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indicator jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum target 7 unit dengan anggaran Rp. 100.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 7 unit sebesar Rp. 90.725.800,00 (90,73%)

- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan indicator jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota target 12 bulan dengan anggaran Rp. 900.000.000,00 dan capaian relaisasi 12 bulan sebesar Rp. 780.682.790,00 (86,74%)

Sub kegiatan pada kegiatan ini adalah :

- a) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan indicator jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota target 70 kali dengan anggaran Rp. 150.000.000,00 dan capaian relaisasi adalah 51 kali sebesar Rp. 91.406.940,00 (69,39%)
- b) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan indicator jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota target 100 kali dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 dan capaian realisasi adalah 100 kali sebesar Rp. 149.999.850,00 (99,99%)
- c) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan indicator jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota target 218 kali dengan anggaran sebesar Rp. 600.000.000,00 dan capaian realisasi 201 kali sebesar Rp. 539.276.000,00 (89,88%)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satpol PP Kabupaten Mojokerto sebagai aparatur pemerintah daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto

Tabel T-C.29

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2021
KABUPATEN MOJOKERTO**

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Jumlah/kuantitas) Kegiatan (Sat. Fisik)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana SKPD) Tahun 2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan/Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2021 (1-3)			Target Program dan Kegiatan (Rencana SKPD tahun 2021)	Perincian Realisasi Capaian Target Rencana SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Kinerja SKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat capaian Realisasi target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9	10(9/10)	11(10/11)
1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018, 2019 dan 2020									
1.05.1.05.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% Kebutuhan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%			100%
1.05.1.05.03.01.02	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah rekening telepon dan listrik yang dibayar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%			100%
1.05.1.05.03.01.03	Penyediaan Jasa Perijinan kend araan /Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang telah dibayar PKB dan STNKnya	18 unit	23 unit	23 unit	23 unit	100%			100%
1.05.1.05.03.01.10	Penyediaan Alat-alat tulis	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%			100%
1.05.1.05.03.01.11	Penyediaan Barang Cetak penggandaan	Jumlah cetakan dan penggan- daan yang dibutuhkan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%			100%
1.05.1.05.03.01.13	Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan kantor	Jumlah perabotan & perling- kapian yang dibutuhkan - kursi makan - almam serig - laptop	22 unit 13 buah 5 buah 3 unit	15 unit	10 unit	10 unit	100%			100%

KODE	Uraian/Isi Urusan Pencapaian Daerah dan Program/Raport	Indikator Kinerja Program Pencapaian Kegiatan (Sat. Pok)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana SKPD Tahun 2018)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Tabelan Kegiatan di Daerah Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2018 (in %)			Target Program dan Kegiatan (Rencana SKPD tahun 2017)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Rata- Rata SKPD Tahun 2018	Realisasi Rencana SKPD Tahun 2018	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (Tahun 2017)	Tingkat capaian Realisasi target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/8)	
1.05.1.05.03.01.17	Persediaan Makanan & Minuman	- jumlah buku Jumlah makanan dan minuman rapat yang dibutuhkan	1 buah 10 kali	1 buah 10 kali	10 kali	10 kali	100%		100%	
1.05.1.05.03.01.21	Rapat-rapat Koordinasi dan Daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dibutuhkan	250 OR	458 OR	458 OR	458 OR	100%		100%	
1.05.1.05.03.01.23	Persediaan Jasa tenaga kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan	25 Orang	22 orang	25 orang	25 orang	100%		100%	
1.05.1.05.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% Kebutuhan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
1.05.1.05.03.02.07	Pengadaan Peningkatan gedung kantor	Jumlah peningkatan gedung kantor yang dibutuhkan Papan Struktur Organisasi Gambar Presiden, Wakil Presiden dan Biring Ganala - Alat pendingin	7 unit 1 buah 3 buah 3 unit	4 unit	3 unit	3 unit	100%		100%	
1.05.1.05.03.02.08	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung yang dilakukan	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%		100%	
1.05.1.05.03.02.04	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang dilakukan	18 unit	30 unit	20 unit	20 unit	100%		100%	
1.05.1.05.03.02.05	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilakukan	52 unit	27 kali	27 kali	27 kali	100%		100%	
1.05.1.05.03.02.04	Rehabilitasi kendaraan/beralat kendaraan dinas/operasional	Jumlah rehab kendaraan dinas/operasional yang	2 unit	4 unit	2 unit	2 unit	100%		100%	

KODE	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Indikator) Kegiatan (Out Put)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana SKPD) Tahun 2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan/Kegiatan s.d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2021 (s.d)			Target Program dan Kegiatan (Rencana SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana SKPD s.d tahun berjalan	
					Target Kinerja SKPD Tahun 2021	Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat capaian Realisasi target Rencana (%)
1.05.1.05.01.02.45	Pengadaan Peralatan Kerja	-Bekuan - Jumlah peralatan kerja yang dibutuhkan - Sepatu provost Pol PP - Topi - Helm provost Pol PP	95 buah	39 unit/buah	39 unit buah	39 unit buah	100%			100%
1.05.1.05.01.01	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	- % Kebutuhan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%			100%
1.05.1.05.03.01.02	Pengadaan Pakain dinas dan alatengkapannya	- Jumlah pakain dinas dan perlengkapannya yang dibutuhkan	70 stel	288 stel	218 stel	218 stel	100%			100%
1.05.1.05.03.01	Program Peningkatan Pengerjaan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	- % Kebutuhan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%			100%
1.05.1.05.03.01.05	Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja	- Jumlah dokumen rencana tahunan & laporan kinerja SKPD yang disusun	5 dokumen	5 dokumen	5 dok	5 dok	100%			100%
1.05.01.05.01.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	- % penyelesaian pengamanat uruk rawa yg tertangan - % penyelesaian kasus pelanggaran Perda - % Masyarakat/badan hukum yang disosialisasi - % aparat Pol PP / Satbrimas yang mengikuti pelatihan/pembinaan - % Penyelesaian jumlah	100%	125%	133%	100%	121%			121%
			100%	103%	104%	100%	110%			110%
			50%	50%	55%	50%	50%			50%
			30%	21%	22%	22%	100%			100%
			100%	50%	50%	50%	50%			50%

KODE	Uraian/Isi Group Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Performance) Kegiatan (Dit. Pdt)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana SKPD Tahun 2019)	Realisasi target Kinerja hasil Program dan Kegiatan/Kegiatan strategis tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Rencana SKPD tahun 2017)	Pencapaian Realisasi Capaian Target Rencana SKPD s.d/ tahun berjalan	
					Target Kinerja SKPD Tahun 2018	Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (Tahun 2017)	Tingkat capaian Realisasi target Rencana (%)
1.05.1.05.03.15.14	Operasional Pengamanan Daerah	pelanggaran K3	16 aset	38 aset	38 aset	38 aset	100%		100%	
1.05.1.05.03.15.15	Operasional Pengawasan	Jumlah pengawasan dan peng- amanan Pejabat Daerah / Pejabat Negara	70 kali	60 kali	60 kali	60 kali	100%		100%	
1.05.1.05.03.15.16	Jambore dan HUT Polisi Pemong Praja	Jumlah kegiatan yang dilak- ukan terkait dengan peningkatan penyediaan pelanggaran K3	3 kegiatan	2 keg	2 keg	2 keg	100%		100%	
1.05.1.05.03.15.17	Operasional PPH2	Jumlah penyidikan dan peny- idikan pelanggaran Perda	42 kali	24 kali	120 kali	120 kali	100%		100%	
1.05.1.05.03.15.18	Operasional Katerbitan dan Keterlibatan	Jumlah pemantauan & penye- lesaian keterlibatan wilayah	107 kali	48 kali	67 kali	67 kali	100%		100%	
1.05.1.05.03.15.19	Pemeriksaan Pelanggaran Perda	Jumlah pemeriksaan pelanggaran Perda	38 kali	37 kali	40 kali	40 kali	100%		100%	
1.05.1.05.03.15.20	Operasional Pemeriksaan PSK	Jumlah pemeriksaan PSK dan pelayanan masyarakat	10 kali	9 kali	12 kali	12 kali	100%		100%	
1.05.1.05.03.15.21	Operasional Penyuluhan Perda	Jumlah penyuluhan dan sosialisasi Perda/Perkada di masye- rakat/badan hukum	50 kali	48 kali	50 kali	50 kali	100%		100%	
1.05.1.05.03.15.24	Operasional Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah penegakan dan pemid- dangan terhadap pelanggaran	27 kali	26 kali	27 kali	27 kali	100%		100%	

KODE	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Substansi) Kegiatan (Dit. Pdt)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana RPMD) Tahun 2015	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Kegiatan dit. dengan tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun lalu (A-D)			Target Program dan Kegiatan (Rencana RPMD tahun 2017)	Pencapaian Realisasi Capaian Target Rencana RPMD s.d tahun berjalan	
					Target Rencana RPMD Tahun 2015	Realisasi Hasil RPMD Tahun 2015	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (Tahun 2017)	Tingkat capaian Realisasi target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9/8)	
1.05.1.05.03.15.25	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Sistemawakarna di daerah	perundang-undangan daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%		100%	
1.05.1.05.03.15.26	Pelatihan Keasamugiban	Jumlah kegiatan yang diikuti terkait dengan penyelesaian pelanggaran Perda	37 kali	35 kali	37 kali	37 kali	100%		100%	
1.05.1.05.03.15.29	Pengamanan Pemilu	Jumlah pengamanan Rigub di PPS dan PPK	322 PPS / PPK	-	-	-	-		-	
1.05.1.05.03.16	Program : Pemeliharaan Keasamugiban dan Pencegahan Tindak Kriminal	- % pengamanan ujiuk rasa yang terlampaui - % penyelesaian jumlah pelanggaran KD - % aparat Polisi PP / Satimas yang terlibat	100%	125%	133%	100%	121%		121%	
			100%	90%	89%	91%	89%		89%	
			20%	21%	22%	22%	100%		100%	
1.05.1.05.03.16.03	Kerjasama pengembangan kemampuan Aparat Pol PP dengan TNI/Polri & Kejaksaan	Jumlah kegiatan yang diikuti terkait dengan peningkatan penanganan pengamanan pengamanan ujiuk rasa	14 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100%		100%	
1.05.1.05.03.16.07	Penguatan Potensi Lintas (Sukalek B)	Jumlah Satimas yang mengikuti Sukalek B	75 orang	75 orang	75 orang	75 orang	100%		100%	
1.05.1.05.03.16.08	Peningkatan Kapasitas SDM Satimas dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Satimas yang mengikuti pembinaan dan pelatihan penanggulangan bencana	180 orang	200 orang	200 orang	200 orang	100%		100%	
1.05.1.05.03.16.09	Optimalisasi Personel Satimas	Jumlah Satimas yang mengi-	180 orang	204 orang	204 orang	204 orang	100%		100%	

KODE	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Subkomisi) Kegiatan (Dak Pol)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana RPMD) Tahun 2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Kegiatan s.d. dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun lalu (n-1)			Target Program dan Kegiatan (Rencana RPMD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana RPMD s.d tahun berjalan	
					Target Kinerja RPMD Tahun 2020	Realisasi Rencana RPMD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat capaian Realisasi target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(7/8)	9	10(9+7+8)	11(10/9)
1.05.1.05.03.16.14	Desa/Kelurahan dalam Pem- binaan dan Peningkatan Sektoral Desa/Kelurahan	Kuliah pembinaan Pemawaklaha- n Jumlah Sektoral yang meng- ikuti pembinaan	300 orang	-	90 orang	90 orang	100%			100%
1.05.1.05.03.20	Pemberantasan Barang Bekas sukai ilegal	% penyelesaian jumlah pelanggaran K2	90%	91%	90%	90%	90%			90%
1.05.1.05.03.23.01	Pengumpulan informasi rokok yang tidak dibekali pile cukai di peredaran atau tempat penjualan rokok (SG-CUKAI)	Terlaksananya pemantauan penjualan rokok ilegal	20 kali	18 kali	20 kali	20 kali	100%			100%
	TAHUN 2021									
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah KABUPATENKOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah						82,9 (A)	85,4 (A)	98%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14 dokumen	0 dokumen	0%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						8 dokumen	0 dokumen	0%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6 dokumen	0 dokumen	0%
7.01.01.2.03	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						14 bulan	14 bulan	70%
7.01.01.2.03.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						14 bulan	14 bulan	70%

KODE	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Jumlah/Nilai) Kegiatan (Nilai Fisik)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana MPD) Tahun 2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan/Kegiatan ini dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2019 (1-2)			Target Program dan Kegiatan (Rencana MPD tahun 2021)	Pencapaian Realisasi Capaian Target Rencana MPD s.d tahun berjalan	
					Target Kinerja MPD Tahun 2019	Realisasi Rencana MPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan ini tahun (Tahun 2021)	Tingkat capaian Realisasi target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(108)	9(118)	10(108)	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					70 orang	70 orang	0%	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					70 orang	70 orang	0%	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah					12 bulan	12 bulan	70%	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					12 bulan	12 bulan	70%	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					10 unit	10 unit	10%	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor					10 kali	10 kali	100%	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					1 paket	1 paket	100%	
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Penyediaan Bahan/Material					1 paket	1 paket	100%	
7.01.01.2.06.08	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					235 OH	54 OH	23%	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					7 unit	7 unit	100%	
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kambarsan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					3 unit	3 unit	100%	

KODE	Unit/Bagian/Unitas Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Indikator/ Kegiatan (Out Put)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana RKPD) Tahun 2018	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan/Kegiatan di semester tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2018 (1-3)			Target Program dan Kegiatan (Rencana RKPD tahun 2018)	Persentase Realisasi Capaian Target Rencana RKPD s.d akhir semester	
					Target Kinerja RKPD Tahun 2018	Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2018	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d akhir semester (Tahun 2018)	Target capaian Realisasi target Semesta (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7.01.01.2.07.08	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4 unit	4 unit	100%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						10 orang	10 orang	100%
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1 orang	1 orang	100%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						9 orang	9 orang	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						45 unit	45 unit	100%
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						22 unit	22 unit	100%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Personel Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Personel Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						22 unit	22 unit	100%
7.01.01.2.09.08	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						26 kali	26 kali	100%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1 unit	1 unit	100%
07.01.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pembinaan pelaksanaan Perda yang bertanggung						90%	87%	89%

KODE	Unsur/Bidang Unsur Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan (Output) Kegiatan (Out Put)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana SKPD) Tahun 2019	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan/Kegiatan di Anggaran tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2019 (1-3)			Target Program dan Kegiatan (Rencana SKPD) tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana SKPD 1-3 tahun berjalan	
					Target Renc. SKPD Tahun 2019	Realisasi Hasil SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan di tahun berjalan (Tahun 2019)	Tingkat capaian Realisasi target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(100%)	9	10(100%)	11(100%)
		<p>Presentase penanganan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum yang dilaksanakan</p> <p>Presentase anggota SelSimas yang terlatih</p>						90%	92%	97%
7.01.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						236 kali	202 kali	81%
7.01.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Diri dan Cegah Diri, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Diri dan Cegah Diri, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan						122 kali	122 kali	100%
7.01.02.2.01.02	Perindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Pemberian dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Perindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Pemberian dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa						114 kali	102	82%
7.01.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota						100 orang	100 orang	100%
7.01.02.2.01.04	Pembudayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta Pembudayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum						234 orang	234 orang	100%
7.01.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bersuara Hak Asasi Manusia	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bersuara Hak Asasi Manusia						70 orang	70 orang	100%

KODE	Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Substansi/ Kegiatan (Output/Pro))	Target Kinerja Capaian Program (Rencana RPJPD Tahun 2025)	Realisasi target Kinerja Real Program dan Kebijakan Kegiatan s.d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2018 (1-3)			Target Program dan Kegiatan (Rencana RPJPD tahun 2021)	Pencapaian Realisasi Capaian Target Kinerja RPJPD s.d tahun berjalan	
					Target Kinerja RPJPD Tahun 2018	Realisasi Kinerja RPJPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (Tahun 2021)	Tingkat capaian Realisasi target Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/8	9	10=(9*100)	11=(10/11)
7.01.02.2.01.01	Kerjasama antar Lembaga dan Komitran dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Keterlambatan dan Keterliban Umum	Jumlah peserta Kerjasama antar Lembaga dan Komitran dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Keterlambatan dan Keterliban Umum						70 orang	70 orang	100%
7.01.02.2.01.04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keterlambatan dan Keterliban Umum	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keterlambatan dan Keterliban Umum						7 unit	7 unit	100%
7.01.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota						388 kal	302 kal	80%
7.01.02.2.01.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota						70 kal	47 kal	60%
7.01.02.2.01.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota						100 kal	100 kal	100%
7.01.02.2.01.03	Pemertan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Pemertan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota						218 kal	201	97%

Mojokerto, Pebruari 2022
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN MOJOKERTO


 EDDY TAUFIQ S.STP

Pembina Tingkat I
 NIP. 19750604 199810 1 001

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Satpol PP merupakan unsur pembantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pengakan Perda, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat Sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto menetapkan visi dinas yakni “Menjadi Institusi Penegak Peraturan Perundang-undangan Yang Profesional”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Satpol PP merumuskan misi :

1. Mewujudkan Penegakan Peraturan Perundang-undangan yang Inovatif, Responsif, dan kompeten
2. Mewujudkan kondusifitas masyarakat yang aman, nyaman dan tertib

Tujuan dari perencanaan strategis sesuai dengan visi dan misi di atas yakni Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Perundang-undangan yang lain, dan Meningkatkan Ketenteraman berbasis partisipasi masyarakat. Sesuai dengan rencana strategis (renstra) 2021-2026, Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan sasaran :

1. Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meningkat
2. Partisipasi masyarakat dalam perlindungan masyarakat meningkat

Di dalam melaksanakan visi dan misi tersebut, Satpol PP sebagai aparatur penegak Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tidak akan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal tanpa ada dukungan dan peran serta masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman. Di dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang Penegakan Perda, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satpol PP Kabupaten Mojokerto menerapkan standar dan tolak ukur

kinerja yang ditentukan di dalam perencanaan strategis dan juga mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal. Dasar hukum penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Ketertiban adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Pengukuran hasil kinerja pelayanan Satpol PP ditentukan berdasarkan capaian indikator kinerja Satuan dimana telah ditentukan indikator sasaran dan program, rumusan penghitungan indikator kinerja kegiatan, target capaian di dalam rencana strategis dan juga capaian kerjanya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi untuk Menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Mojokerto, Satuan Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motivator.

Disamping dinas teknis yang membidangi fungsi sosialisasi, pengawasan dan pelayanan masyarakat, masih tetap dibutuhkan instrumen pendukung dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mojokerto. Instrumen dimaksud dibutuhkan karena berdasarkan data yang ada, jumlah tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Mojokerto menunjukkan angka variatif dan senantiasa fluktuatif dari tahun ke tahun. Instrumen pendukung dimaksud adalah pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja, melalui usulan program, kegiatan dan anggaran tahun 2023.

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten dan Kota disebutkan bahwa salah satu target jenis pelayanan dasar yang harus dicapai adalah Tingkat Penurunan Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) di

Kabupaten/Kota, di mana ditargetkan pada tahun 2020 harus mencapai persentase 90%. Jenis pelayanan dasar ini merupakan domainnya Satuan Polisi Pamong Praja.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penurunan Pelanggaran K3 (ketertiban, kebersihan dan keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional itu langkah kegiatan yang perlu diambil adalah :

- a. Melaksanakan pemantauan gangguan Tibumtranmas di jalan, tempat hiburan dan ruang umum;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan;
- d. Pendidikan dan Pelatihan PPNS bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Melaksanakan penertiban dan monitoring dengan berkoordinasi bersama dinas terkait yang menyangkut penegakan Peraturan Daerah;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan terhadap anggota Satlinmas terkait dengan peningkatan kursus kader pelaksana, penanggulangan bencana dan Pamswakarsa.

dan tentunya langkah kegiatan tersebut harus diimbangi dengan penyediaan anggaran yang cukup. Untuk lebih jelasnya Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto tahun 2021 dapat dilihat pada tabel T-C.30

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dari hasil evaluasi pelaksanaan renja dan pencapaian kinerja Renstra SKPD, dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Tabel T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MOJOKERTO

No.	INDIKATOR	SPM / Standar Nasional	SKK	Target Kinerja SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun (Tahun n-2)	Tahun (Tahun n-1)	Tahun (Tahun n)	Tahun (Tahun n+1)	Tahun (Tahun n-2)	Tahun (Tahun n-1)	Tahun (Tahun n)	Tahun (Tahun n+1)	
1	2	3	4	5	7	6	8	11	12	13	14	15
1	Persentase pelanggaran Perda yang tertangani	90%		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
2	Persentase penanganan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum yang terselesaikan	90%		90%	90%	90%	90%	92%	88%	90%	90%	
3	Persentase anggota Satlantas yang terlatih	30%		30%	35%	40%	45%	32%	35%	36%	40%	

Mojokerto, Februari 2022
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN MOJOKERTO


EDDY TAUFIQ, S.STP
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19730804 198810 1 001

1) Tugas Fungsi SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Satpol PP Kabupaten Mojokerto merupakan unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah di bidang Penegkan Perda, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

2) Permasalahan dan Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan yang jika tidak diantisipasi saat ini akan menimbulkan permasalahan di masa datang dan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dalam jangka panjang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Pada hakekatnya, permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Secara umum pemerintah telah memiliki program dari tahun ke tahun, sedangkan masyarakat memiliki aktivitas rutin dalam mengendalikan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Namun hal tersebut belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mengurangi pelanggaran perda. Faktor penurunan jumlah pos ronda akibat pengalihan status tanah di wilayah, masih belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, serta belum adanya sinergitas sistem keamanan lingkungan juga mempengaruhi kualitas siskamling di Kabupaten Mojokerto. Selain itu, tahapan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto masih dilakukan secara parsial karena belum adanya sistem informasi manajemen penegakan peraturan daerah (Simgakda) yang memungkinkan penegakan perda terlaksana secara efektif. Dalam rangka mewujudkan penyelesaian permasalahan tersebut, maka pada tahun 2020 Satpol PP Kabupaten Mojokerto terus berupaya melaksanakan komitmen dan selalu konsisten dalam menyelenggarakan kegiatan tematik yang pelaksanaannya telah dimulai dari tahun 2015 yakni “Gerakan Penyuluhan Perda”, dimana dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman, menanamkan kesadaran dan kepedulian kepada masyarakat akan pentingnya menaati peraturan daerah Kabupaten Mojokerto demi tercapainya ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Mojokerto yang sejatinya merupakan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah masih tingginya angka pelanggaran Perda Kabupaten Mojokerto yang terjadi di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa strategi penegakan pelanggaran perda yang secara rutin dilaksanakan oleh Satpol PP, baik secara represif non yustisi dan pro yustisi serta putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran perda masih belum cukup mampu untuk menimbulkan efek jera dan efektif mengurangi angka pelanggaran perda. Dari permasalahan-permasalahan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam rangka menciptakan stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, selain membutuhkan kompetensi aparaturnegak peraturan perundang-undangan, dalam hal ini fungsi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto, juga diperlukan kontribusi, partisipasi dan dukungan semua unsur baik institusi terkait maupun dari segala komponen lapisan masyarakat. Oleh karena itulah maka isu strategis dalam bidang Penegakan Perda, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang secara tidak langsung dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dapat dirumuskan “Perlunya Pemanfaatan Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat dalam Turut Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang didukung dengan sinergitas Institusi Penegak Peraturan Perundang-Undangan”.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto :

1. Masih belum optimal alat perlengkapan pengamanan internal Satpol PP untuk penanganan unjuk rasa
2. Masih lemahnya koordinasi dengan instansi terkait maupun dengan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kecamatan
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah beserta ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya
4. Masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan arti pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban

5. Belum terwujudnya penegakan Peraturan Daerah secara optimal
6. Belum optimalnya pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah
7. Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban dan pelanggaran Peraturan Daerah.

Disamping itu ada permasalahan lain yang dihadapi Satpol PP antara lain :

- a. Kualitas SDM anggota Satpol PP dan PPNS masih kurang memadai;
- b. Kurangnya pemahaman sebagian anggota Satpol PP terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto;
- c. Masih kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. Sering terjadi konflik sosial dan provokasi yang memicu terjadinya unjuk rasa;
- e. Masih banyaknya kasus pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Bupati antara lain :
 - PKL yang menempati ruang publik;
 - Penambang Galian Golongan C yang tidak memiliki ijin;
 - Tempat hiburan umum yang belum memiliki ijin;
 - Pemasangan reklame yang ditempatkan di ruang publik yang belum dilengkapi ijin;
 - Perusahaan yang belum memiliki dan melengkapi surat ijin usaha Perusahaan.
- f. Masih adanya PSK yang melakukan praktek secara liar di beberapa tempat di wilayah Kab. Mojokerto;
- g. Belum optimalnya penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Perda.
- h. Bencana alam yang sering terjadi dan tidak bisa diprediksi.
- i. Masih kurangnya jumlah anggota Satpol PP Kab. Mojokerto sehingga pelaksanaan tugas menjadi kurang optimal.

- j. Minimnya pengetahuan anggota Satlinmas terhadap tugas-tugas sebagai petugas pengaman wilayah.

3) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD :

1. Keterbatasan jumlah SDM aparat ketertiban tidak sebanding dengan semakin meningkatnya obyek penegakan pelanggaran peraturan daerah.
2. Kompetensi petugas dalam mengantisipasi permasalahan pelanggaran peraturan daerah diharapkan lebih optimal dari segi kreatifitas dan profesionalisme
3. Optimalisasi operasional dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah secara preventif maupun represif.
4. Memaksimalkan sanksi denda kepada para pelanggar.
5. Optimalisasi strategi penegakan perda secara pre-emptif kepada masyarakat
6. Optimalisasi sarana prasarana dan SDM yang ada secara profesional dan proporsional dalam pelaksanaan tugas penegakan Perda, operasional ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
7. Adanya komitmen Kepala Daerah dalam hal ketentraman dan ketertiban umum.
8. Adanya dukungan moral dari tokoh masyarakat.
9. Koordinasi antar instansi/lembaga terkait semakin mantap.

4) Rekomendasi dan Catatan Strategis

Berdasarkan analisis tugas pokok, fungsi, permasalahan, isu strategis, hambatan, peluang dan tantangan yang dihadapi Satpol PP Kabupaten Mojokerto, maka dapat disusun rekomendasi dan catatan terkait dengan prioritas perencanaan kegiatan Satpol PP Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2022 :

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP Kabupaten Mojokerto selalu berkomitmen untuk mewujudkan amanat undang-undang tersebut melalui program dan kegiatan penegakan peraturan daerah baik secara yustisi maupun non yustisi dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, serta masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

2. Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta berpedoman pada motto dinas yakni “Kabupaten Mojokerto Tertib Bersama Masyarakat”, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur penegak Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tidak akan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal tanpa ada dukungan dan peran serta masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam menjaga ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja berupaya untuk menjadikan masyarakat bukan sebagai obyek kegiatan penegakan peraturan daerah tetapi juga dibutuhkan peran serta dan dukungan sebagai subyek penegakan peraturan. Penertiban dengan menggunakan pendekatan penegakan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai alat kekuasaan untuk mewujudkan stabilitas ketenteraman dan ketertiban. Pendekatan ‘melayani dan melindungi’ dapat menjadi model alternatif yang lebih humanis. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya dalam proses pemenuhan kebutuhan akan rasa tenteram dan tertib. Dalam rangka

mewujudkan hal tersebut, maka pada tahun 2022 Satpol PP menyelenggarakan optimalisasi kegiatan tematik “Penumbuhan Gerakan penyuluhan Perda”, dimana dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman, menanamkan kesadaran dan kepedulian serta memberdayakan masyarakat yang dapat mengubah pola sikap dan perilaku untuk selalu hidup teratur sehingga menumbuhkan rasa tenteram di lingkungan masyarakat. Dengan pelaksanaan prioritas program dan kegiatan tersebut, untuk selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki kondisi umum daerah secara makro, diantaranya :

- a. Penyelesaian masalah ketentraman dan ketertiban umum yang berorientasi kearifan local
- b. Terjadinya proses penanaman nilai-nilai kemandirian, kedisiplinan, kepedulian, dan kebersamaan di masyarakat
- c. Keluhan masyarakat terkait gangguan ketentraman dan ketertiban umum dapat diminimalisir.
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peran serta dan partisipasi dalam mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- e. Meningkatnya kredibilitas aparaturnya penegak Peraturan Perundang-undangan.
- f. Berkurangnya penyakit masyarakat (pekat).
- g. Berkurangnya pelanggaran peraturan daerah.

Adapun kegiatan yang mendukung prioritas program dan kegiatan di atas, diantaranya adalah kegiatan :

- Operasional PPNS;
- Penertiban Pelanggaran Perda;
- Operasional Penertiban Penyakit Masyarakat (PSK, Gepeng, Anjal);
- Operasional Penyuluhan Perda;
- Operasional Penegakan Perundang-undangan Daerah
- Operasional Pengamanan Aset-aset Daerah;
- Operasional Pengawasan;
- Operasional Ketentraman dan Ketertiban;

- Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pemberantasan Siskamswakarsa di Daerah;
- Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan;
- Penguatan potensi linmas (Suskalak B);
- Peningkatan kapasitas SDM Satlinmas dalam penanggulangan bencana;
- Optimalisasi peran Satlinmas Desa/Kelurahan dalam Pamswakarsa di daerah.
- Pembinaan dan Penyelenggaraan Satlinmas Desa/Kelurahan.

Menumbuhkembangkan kegiatan ketentraman dan ketertiban yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan, peran serta masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan lagi, melalui :

- A. Peningkatan pelayanan masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering bebenturan dalam memandang kewajiban selaku pengajar masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini dan benturan yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, disamping perlunya dibangun Satuan Polisi Pamong Praja yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan, pelindung, pengayom masyarakat.
- B. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bentuk – bentuk pengawasan swakarsa sebagai pengemban fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing – masing. Bentuk – bentuk pengawasan swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul dalam masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya melalui upaya – upaya yang mengutamakan tindakan – tindakan pencegahan dan penangkalan. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman / gangguan keamanan dan ketertiban melalui kegiatan pengaturan

penjagaan, pengawasan dan Patroli serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib dan teratur.

C. Kurangnya koordinasi sehingga upaya penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan tidak maksimal dalam memperoleh hasil yang diharapkan. Upaya dalam bentuk tindakan yang didasarkan menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan guna mencari serta mengumpulkan barang bukti atas pelanggaran peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dapat dilaksanakan melalui tindakan TIPIRING bekerjasama dengan instansi terkait.

Tujuan dari perencanaan strategis sesuai dengan visi dan misi di atas yakni Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Perundang-undangan yang lain, dan Meningkatkan Ketentraman berbasis partisipasi masyarakat. Sesuai dengan rencana strategis (renstra) 2021-2026, Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan sasaran :

1. Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meningkat
2. Partisipasi masyarakat dalam perlindungan masyarakat meningkat

Di dalam melaksanakan visi dan misi tersebut, Satpol PP sebagai aparatur penegak Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto tidak akan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal tanpa ada dukungan dan peran serta masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam menjaga ketertiban dan ketentraman. Di dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang Penegakan Perda, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satpol PP Kabupaten Mojokerto menerapkan standar dan tolak ukur kinerja yang ditentukan di dalam perencanaan strategis dan juga mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal. Dasar hukum penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Ketertiban adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Pengukuran hasil kinerja pelayanan Satpol PP ditentukan berdasarkan capaian indikator kinerja Satuan dimana telah ditentukan indikator sasaran dan program, rumusan penghitungan indikator kinerja kegiatan, target capaian di dalam rencana strategis dan juga capaian kinerjanya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi untuk Menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Mojokerto, Satuan Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motivator.

Disamping dinas teknis yang membidangi fungsi sosialisasi, pengawasan dan pelayanan masyarakat, masih tetap dibutuhkan instrumen pendukung dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mojokerto. Instrumen dimaksud dibutuhkan karena berdasarkan data yang ada, jumlah tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Mojokerto menunjukkan angka variatif dan senantiasa fluktuatif dari tahun ke tahun. Instrumen pendukung dimaksud adalah pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja, melalui usulan program, kegiatan dan anggaran tahun 2021.

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten dan Kota disebutkan bahwa salah satu target jenis pelayanan dasar yang harus dicapai adalah Tingkat Penurunan Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) di Kabupaten/Kota, di mana ditargetkan pada tahun 2020 harus mencapai persentase 90%. Jenis pelayanan dasar ini merupakan domainnya Satuan Polisi Pamong Praja.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penurunan Pelanggaran K3 (ketertiban, kebersihan

dan keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga keindahan.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional itu langkah kegiatan yang perlu diambil adalah :

- a. Melaksanakan pemantauan gangguan Tibumtranmas di jalan, tempat hiburan dan ruang umum;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan;
- d. Pendidikan dan Pelatihan PPNS bagi aparat Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Melaksanakan penertiban dan monitoring dengan berkoordinasi bersama dinas terkait yang menyangkut penegakan Peraturan Daerah;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan terhadap anggota Satlinmas terkait dengan peningkatan kursus kader pelaksana, penanggulangan bencana dan Pamswakarsa.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review ini meliputi kegiatan indentifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, tolok ukur/target sasaran program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program kegiatan SKPD. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dengan memperhatikan pagu anggaran APBD 2023, penentuan pagu indikatif program/kinerja di Satpol PP Kabupaten Mojokerto terdapat peningkatan anggaran dibandingkan dengan pagu indikatif anggaran menurut rancangan awal RKPD

1. Peningkatan anggaran kegiatan pada Program AP dan program utama pada Satpol PP dikarenakan terdapat jumlah volume target capaian keluaran bertambah. Di samping itu dipengaruhi oleh penyesuaian standardisasi harga barang/jasa serta bertambahnya sarana dan

prasarana fasilitas belanja modal serta pemeliharaan dan rehab sarana prasarana gedung kantor. Penambahan anggaran tersebut dalam rangka mendukung keberhasilan program teknis pada Satpol PP.

2. Pada Program Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal anggaran digunakan dalam rangka mendukung program dan kegiatan penyelesaian pelanggaran dan penegakan perda di wilayah Kabupaten Mojokerto secara yustisi maupun non yustisi. Anggaran Program ini juga diprioritaskan mendukung program pengamanan umum dan kegiatan pemkab, penataan kawasan Jalan dan trotoar dari pedagang kaki lima serta pemantapan kewaspadaan dini masyarakat dalam rangka mewujudkan ketentraman dan keamanan wilayah. Anggaran program ini juga adanya kebutuhan anggaran kegiatan tematik “Gerakan penyuluhan Perda” serta pendukung peningkatan kesiapsiagaan penanganan ketentraman dan ketertiban. Selain itu juga untuk penguatan potensi masyarakat dalam rangka meminimalisir gangguan tramtibmas pada umumnya melalui pembinaan dan pemberdayaan petugas linmas.

Berdasarkan pada evaluasi capaian kerja pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun lalu beserta proyeksi pencapaian kinerja Tahun 2021, program indikatif di tahun 2022 yang bersifat lintas wilayah dan strategis dari RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026, telaah tujuan dan tahapan pembangunan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025, telaah arahan strategi pengembangan kewilayahan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2021-2026, telaah prioritas RPJMN 2021-2026, analisis isu-isu kebijakan nasional, platform Kepala Daerah terpilih dan dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 maka Tema RKPD Tahun 2023 adalah “Pengembangan SDM dalam rangka peningkatan pelayanan kemudahan usaha dan stimulasi penguatan sektor potensial.” Dari tema tersebut ditetapkan skala prioritas pembangunan Tahun 2023 sebagai berikut :



1. Penguatan SDM di bidang pendidikan, kesehatan, dan penumbuhan wirausaha baru
2. Penguatan usaha mikro berbasis potensi unggulan
3. Pengembangan kawasan perdesaan
4. Peningkatan infrastruktur
5. Pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan

Berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 dan Renstra SKPD, maka Satuan Polisi Pamong Praja mengajukan 8 program yang terdiri dari 34 Kegiatan. Dari usulan program kegiatan yang masuk ke dalam RKPD tentunya diharapkan bisa dilaksanakan semua dengan baik. Berikut tabel Daftar Program dan Kegiatan pada Tahun 2022 yang merupakan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Mojokerto.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di wilayah kecamatan. Dari hasil penjangkaran aspirasi masyarakat di forum musrenbang ini tidak terdapat usulan kegiatan baru yang diusulkan oleh masyarakat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5), pada Bab III Pasal 4 Butir e point 1 dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan fungsi sehingga sesuai dengan tupoksinya Satuan Polisi Pamong Praja tidak mengakomodir usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam restra Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum (Ditjen PUM) pada Kementerian Dalam Negeri ada satu target terkait Satuan Polisi pamong Praja yang memerlukan dukungan provinsi dan Kabupaten/kota. Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan Satpol PP sesuai peraturan perundang undangan yang ditarget pada tahun 2014 sejumlah 33 provinsi, pada kenyataannya masih banyak provinsi yang kapasitas kelembagaannya Satpol PP belum sesuai perundangan yang berlaku termasuk juga kabupaten/kota masih banyak kelembagaannya Satpol PP belum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan OPD. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

PROGAM	INDIKATOR PROGRAM	FORMULA PENGUKURAN
Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	1. Persentase pelanggaran perda yang tertangani 2. Prosentase penanganan gangguan ketentraman	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran perda yang tertangani}}{\text{Jumlah pelanggaran perda yang dilaporkan masyarakat atau yang teridentifikasi}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah gangguan tramtibum yang terselesaikan}}{\text{Jumlah gangguan tramtibum yang dilakukan oleh kelompok/golongan masyarakat}} \times 100\%$

	dan ketertiban umum yang terselesaikan	
	3. Persentase anggota Satlinmas yang terlatih	$\frac{\text{Jumlah anggota Satlinmas yang terlatih}}{\text{Jumlah Anggota Satlinmas se Kabupaten Mojokerto}} \times 100\%$

Dalam rangka mewujudkan pencapaian pembangunan diperlukan fokus dan prioritas penanganan permasalahan yang spesifik dan mendasar. Penyusunan prioritas pembangunan mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta menyinergikan dengan rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Prioritas pembangunan pada RKPD 2023 disusun dengan mendasarkan dan memperhatikan pada tema dan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Jatim, yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Memperhatikan prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto untuk Tahun 2022, Satpol PP sebagai aparaturnegak peraturan perundang-undangan mengampu prioritas pembangunan dalam bidang Kinerja Aparatur dan Birokrasi. Hal tersebut sesuai dengan visi Satpol PP Kabupaten Mojokerto yakni menjadi institusi penegak peraturan perundangundangan yang profesional. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintahan yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Visi Misi Kabupaten Mojokerto sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026, sedang Visi dan Misi Satuan Pomang Praja mendukung dari Visi dan Misi Kepala Daerah.

Visi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang mandiri, sejahtera dan bermartabat melalui penguatan dan pengembangan basis

perekonomian, pendidikan serta kesehatan” sedangkan **Misi** yaitu Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat yang merupakan implementasi dari Misi Kepala Daerah Nomor tujuh. Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Visi Misi tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta melaksanakan perlindungan masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan misi menetapkan tujuan sebagai berikut : **“Meningkatnya Kualitas Keimanan dan ketakwaan Masyarakat”** sedangkan indikator tujuan adalah Persentase Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB).

Penjabaran Tujuan tersebut adalah :

- 1) Mewujudkan peningkatan Kualitas Keimanan dan ketakwaan Masyarakat dan profesional aparat dalam pelaksanaan tugas sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Agar tercapainya suatu tujuan maka Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan **Sasaran** yaitu :

Meningkatnya penanganan konflik keagamaan dan memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan dengan indicator sasaran Persentase penurunan pelanggaran Perda. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Mojokerto.

Penjabaran Sasaran tersebut adalah :

- 1) Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung terciptanya profesionalitas dan proporsionalitas kerja pegawai
- 2) Terwujudnya peningkatan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto secara pre-emptif, preventif dan represif Non Yustisi maupun secara represif Pro Yustisi
- 3) Terwujudnya pengendalian dan pengawasan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- 4) Terwujudnya peningkatan profesionalitas dan proporsionalitas kerja pegawai
- 5) Terpenuhinya perlindungan masyarakat

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto menetapkan program operasional, kegiatan dan sub kegiatan pokok organisasi. Secara garis besar program-program operasional tersebut dapat diuraikan berdasarkan orientasi misi sebagai berikut :

1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan kegiatan indikatif :**
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan kegiatan indikatif :**
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan kegiatan indikatif**
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan kegiatan indikatif :**
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan/Material
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kegiatan indikatif :**
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan indikatif :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan indikatif :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

8. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan indikatif :

- a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
- b. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- f. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum

9. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kotadengan kegiatan indikatif :

- a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Secara terinci, Usulan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong



Praja Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat
Tabel T-C.32



Tabel T.C. 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KABUPATEN MOJOKERTO

NAMA PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	lokal	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	lokal	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Setuan Polial Pamong Praja				12.937.929.338,00	Setuan Polial Pamong Praja				12.937.929.338,00	
	PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Setpol PP	Misal SARIP Perangkat Daerah dan Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	83,4 (A) dan 1 inovasi	8.904.929.338,00	PROGRAM PERUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Setpol PP	Misal SARIP Perangkat Daerah dan Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	83,4 (A) dan 1 inovasi	8.904.929.338,00	
	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Setpol PP	Jumlah Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	18.000.000,00	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Setpol PP	Jumlah Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	18.000.000,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Setpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	7.500.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Setpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	7.500.000,00	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Setpol PP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 laporan	7.500.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Setpol PP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 laporan	7.500.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Setpol PP	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70 orang	7.589.929.338,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Setpol PP	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70 orang	7.589.929.338,00	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Setpol PP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang	7.589.929.338,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Setpol PP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang	7.589.929.338,00	
	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Setpol PP	Jumlah Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	170 orang	200.000.000,00	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Setpol PP	Jumlah Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	170 orang	200.000.000,00	
4	Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Setpol PP	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	200.000.000,00	Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Setpol PP	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	200.000.000,00	
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Setpol PP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	0,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Setpol PP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	0,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Setpol PP	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	380.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Setpol PP	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	380.000.000,00	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Setpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 laporan	65.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Setpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	12 laporan	65.000.000,00	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setpol PP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	20 paket	80.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setpol PP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	20 paket	80.000.000,00	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Setpol PP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	10.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Setpol PP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	10.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	lokal	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	lokal	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satpol PP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	1 paket	15.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Satpol PP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	1 paket	15.000.000,00	
10	Penyediaan Bahan/Material	Satpol PP	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	30.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Satpol PP	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	30.000.000,00	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 laporan	150.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 laporan	150.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 unit	30.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 unit	30.000.000,00	
13	Pengadaan Mebel	Satpol PP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 unit	30.000.000,00	Pengadaan Mebel	Satpol PP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 unit	30.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	175.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	175.000.000,00	
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	175.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Satpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	175.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	175.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	175.000.000,00	
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perbaikannya	22 unit	125.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perbaikannya	22 unit	125.000.000,00	
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 unit	15.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 unit	15.000.000,00	
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 unit	35.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 unit	35.000.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satpol PP	Persentase penanganan Perda yang tertangani, Persentase penanganan gangguan ketertremen dan ketertiban umum yang terselesaikan dan persentase anggota Setlimes yang tertatih	90%, 90% dan 30%	4.433.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satpol PP	Persentase penanganan Perda yang tertangani, Persentase penanganan gangguan ketertremen dan ketertiban umum yang terselesaikan dan persentase anggota Setlimes yang tertatih	90%, 90% dan 30%	4.433.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	lokal	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	lokal	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum dalam 1 (satu) Daerah	12 bulan	3.470.000.000,00	Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum dalam 1 (satu) Daerah	12 bulan	3.470.000.000,00	
19	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patrol, Pengamanan, dan Pengawasan	Satpol PP	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patrol, Pengamanan, dan Pengawasan	120 kasus	1.300.000.000,00	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patrol, Pengamanan, dan Pengawasan	Satpol PP	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patrol, Pengamanan, dan Pengawasan	120 kasus	1.300.000.000,00	
20	Perindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Urjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satpol PP	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Urjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Perindakan	104 kasus	850.000.000,00	Perindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Urjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satpol PP	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Urjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Perindakan	104 kasus	850.000.000,00	
21	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	250.000.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	250.000.000,00	
22	Pembudayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pembudayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	2 dokumen	300.000.000,00	Pembudayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pembudayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	2 dokumen	300.000.000,00	
23	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Satpol PP	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	360 orang	600.000.000,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Satpol PP	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	360 orang	600.000.000,00	
24	Kerjasama antar Lembaga dan Komitran dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Komitran dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 dokumen	100.000.000,00	Kerjasama antar Lembaga dan Komitran dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Komitran dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 dokumen	100.000.000,00	

No.	Rancangan Awal RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenraman dan Kertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenraman dan Kertiban Umum yang Tersedia	40 unit	70.000.000,00	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenraman dan Kertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenraman dan Kertiban Umum yang Tersedia	40 unit	70.000.000,00	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 bulan	963.000.000,00	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 bulan	963.000.000,00	
28	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12 laporan	200.000.000,00	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12 laporan	200.000.000,00	
27	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan	300.000.000,00	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan	300.000.000,00	
28	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 laporan	463.000.000,00	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 laporan	463.000.000,00	
J U M L A H					12.937.828.338	J U M L A H					12.937.828.338

Mojokerto, Februari 2022
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN MOJOKERTO

EDDY TAUFIQ, S.T.P.

Pembina Tingkat I

NIP. 19790804 196810 1 001

Tabel T.C. 32

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023
KABUPATEN MOJOKERTO**

NAMA PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Iskasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	Satuan Polisi Pamong Praja			12.937.528.338,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Setpol PP	Nilai SARUP Perangkat Daerah dan Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	8.504.528.338,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Setpol PP	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Setpol PP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000,00	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Setpol PP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Setpol PP	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.559.528.338,00	
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Setpol PP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.559.528.338,00	
	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Setpol PP	Jumlah Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	200.000.000,00	
4	Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Setpol PP	Jumlah Paket Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	200.000.000,00	
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Setpol PP	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Setpol PP	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	360.000.000,00	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Setpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	65.000.000,00	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setpol PP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60.000.000,00	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Setpol PP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10.000.000,00	
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Setpol PP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15.000.000,00	
10	Penyediaan Bahan/Material	Setpol PP	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30.000.000,00	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Setpol PP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Setpol PP	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.000.000,00	
13	Pengadaan Mebel	Setpol PP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Setpol PP	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.000.000,00	
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Setpol PP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	175.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Setpol PP	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175.000.000,00	

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	CATATAN
1	2	3	4	5	6
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Satpol PP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	125.000.000,00	
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	15.000.000,00	
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Satpol PP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35.000.000,00	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satpol PP	Persentase anggaran Perda yang tertangani, Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan dan persentase anggota Satlinmas yang tertatih	4.431.000.000,00	
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.470.000.000,00	
19	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Satpol PP	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.300.000.000,00	
20	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Satpol PP	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	850.000.000,00	
21	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	250.000.000,00	
22	Pembertayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pembertayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	300.000.000,00	
23	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuatan Hak Asasi Manusia	Satpol PP	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	600.000.000,00	
26	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	100.000.000,00	
27	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	70.000.000,00	
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Satpol PP	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	963.000.000,00	
26	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	200.000.000,00	

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Inisiatif	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	CATATAN
1	2	3	4	5	6
27.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	300.000.000,00	
28.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	483.000.000,00	
J U M L A H				12.937.628.338	

Mojoerto, Februari 2022
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN MOJOKERTO

EDDY TAUFIQ S.STP
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19790604 199810 1 001

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Usulan Program Kegiatan Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolok ukur keberhasilannya, maka Tahun Anggaran 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto menetapkan program operasional dan kegiatan pokok organisasi sebesar **Rp. 12.937.528.338,- (Dua belas milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah)** Secara garis besar program, kegiatan dan sub kegiatan operasional tersebut dapat diuraikan berdasarkan orientasi misi sebagai berikut :

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan kegiatan indikatif :**
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan kegiatan indikatif :**
 - b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan kegiatan indikatif**
 - c. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - d. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan kegiatan indikatif :**
 - f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - g. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - i. Penyediaan Bahan/Material
 - j. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan kegiatan indikatif :**
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan indikatif :**

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan indikatif :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

8. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan indikatif :

- a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
- b. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- f. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- g. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum

9. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kotadengan kegiatan indikatif :

- a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Secara terinci, Usulan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat Tabel 4.1



Tabel T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2023
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KABUPATEN MOJOKERTO

Nama OPD : Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
1	2		4	5	6	7	8	9	10
	Satuan Polisi Pamong Praja				12.937.528.338,00				13.843.155.321,66
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAPK Perangkat Daerah dan Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Satpol PP	83,4 (A) dan 1 Inovasi	8.504.528.338,00	APBD		83,4 (A) dan 1 Inovasi	9.099.845.321,66
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	12 bulan	16.000.000,00	APBD		12 bulan	16.000.000,00
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Satpol PP	2 dokumen	7.500.000,00	APBD		2 dokumen	8.025.000,00
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Satpol PP	7 laporan	7.500.000,00	APBD		7 laporan	8.025.000,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Satpol PP	70 orang	7.558.528.338,00	APBD		70 orang	8.088.695.321,66
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Satpol PP	70 orang	7.558.528.338,00	APBD		70 orang	8.088.695.321,66
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Satpol PP	170 orang	200.000.000,00	APBD		170 orang	214.000.000,00
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Satpol PP	1 paket	200.000.000,00	APBD		1 paket	214.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
1	2		4	5	6	7	8	9	
7.01.01.2.06.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Satpol PP	100 orang	0,00	APBD		100 orang	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	Satpol PP	12 bulan	360.000.000,00	APBD		12 bulan	374.500.000,00
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Satpol PP	12 laporan	65.000.000,00	APBD		12 laporan	69.560.000,00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Satpol PP	20 paket	80.000.000,00	APBD		20 paket	85.600.000,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Satpol PP	10 paket	10.000.000,00	APBD		10 paket	10.700.000,00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Satpol PP	1 paket	15.000.000,00	APBD		1 paket	15.090.000,00
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Satpol PP	1 paket	30.000.000,00	APBD		1 paket	32.100.000,00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Satpol PP	12 laporan	150.000.000,00	APBD		12 laporan	160.500.000,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP	7 unit	30.000.000,00	APBD		7 unit	32.100.000,00
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Satpol PP	20 unit	30.000.000,00	APBD		20 unit	32.100.000,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP	12 laporan	175.000.000,00			12 laporan	187.250.000,00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Satpol PP	12 laporan	175.000.000,00	APBD		12 laporan	187.250.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif
1	2		4	5	6	7	8	9	10
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Satpol PP	12 bulan	175.000.000,00	APBD		12 bulan	187.250.000,00
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	Satpol PP	22 unit	125.000.000,00			22 unit	133.750.000,00
7.01.01.2.09.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana (Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	Satpol PP	1 unit	15.000.000,00	APBD		1 unit	16.050.000,00
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Satpol PP	1 unit	35.000.000,00	APBD		1 unit	37.450.000,00
7.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peanggaran Perda yang tertangani, Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan dan persentase anggota Satlinmas yang terlatih	Satpol PP	90%, 90% dan 30%	4.433.000.000,00	APBD		90%, 90% dan 30%	4.743.310.000,00
7.01.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP	12 bulan	3.470.000.000,00	APBD		12 bulan	3.712.900.000,00
7.01.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,	Satpol PP	120 kasus	1.300.000.000,00			120 kasus	1.391.000.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif
1	2		4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Satpol PP	184 kasus	800.000.000,00	APBD		184 kasus	809.500.000,00
7.01.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	Satpol PP	1 dokumen	250.000.000,00	APBD		1 dokumen	267.500.000,00
7.01.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP	2 dokumen	300.000.000,00	APBD		2 dokumen	321.000.000,00
7.01.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Satpol PP	380 orang	600.000.000,00	APBD		380 orang	642.000.000,00
7.01.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kamitran dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kamitran dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Satpol PP	1 dokumen	100.000.000,00	APBD		1 dokumen	107.000.000,00
7.01.02.2.01.08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Satpol PP	40 unit	70.000.000,00	APBD		40 unit	74.900.000,00

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif
1	2		4	5	6	7	8	9	10
7.01.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	12 bulan	963.000.000,00			12 bulan	1.030.410.000,00
7.01.02.2.01.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Satpol PP	12 laporan	200.000.000,00	APBD		12 laporan	214.000.000,00
7.01.02.2.01.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP	12 laporan	300.000.000,00	APBD		12 laporan	321.000.000,00
7.01.02.2.01.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Satpol PP	12 laporan	463.000.000,00	APBD		12 laporan	495.410.000,00
JUMLAH					12.937.528.338				13.843.155.322

Mojokerto, Februari 2022
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN MOJOKERTO

EDDY TAUFIQ, S.STP
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19790804 199810 1 001

Tabel 4.1
MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PADA RKPD 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MOJOKERTO

Kode SKPD : 1.05.02														
Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja														
NO.	KODE	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	UP	B/L	Indikator Kinerja			Lokasi	APBD Kab. (Rp.)	APBD PROV		USULAN APBN		
					Output	Outcome	Target			SKPD Terkait	Pagu (Rp.)	KL	Rp.	D/TB/DAK
1		2					4	5	7		8	9	10	
		Satuan Polisi Pamong Praja						12.937.528.338,00						
	07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	83,4 (A) dan 1 inovasi	Satpol PP	8.504.528.338,00						
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 bulan	Satpol PP	15.000.000,00						
1	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	Satpol PP	7.500.000,00						
2	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 laporan	Satpol PP	7.500.000,00						
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70 orang	Satpol PP	7.559.528.338,00						
3	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang	Satpol PP	7.559.528.338,00						
	7.01.01.2.08	Administrasi Kepegawatan Perangkat Daerah			Jumlah Administrasi Kepegawatan Perangkat Daerah	170 orang	Satpol PP	350.000.000,00						
4	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Paket Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakar Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	Satpol PP	200.000.000,00						
5	7.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	Satpol PP	0,00						
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	Satpol PP	350.000.000,00						

NO.	KODE	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	UP	BL	Indikator Kinerja			Lokasi	APBD Kab. (Rp.)	APBD PROV		USULAN APBN		
					Output	Outcome	Target			SKPD Terkait	Pagu (Rp.)	KL	Rp.	D/TB/DAK
1	2	3					4	5	7		8	9	10	
6	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Satpol PP	65.000.000,00					
7	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 paket	Satpol PP	80.000.000,00					
8	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	Satpol PP	10.000.000,00					
9	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	Satpol PP	15.000.000,00					
10	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	Satpol PP	30.000.000,00					
11	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Satpol PP	150.000.000,00					
	7.01.01.3.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 unit	Satpol PP	30.000.000,00					
13	7.01.01.2.07.08	Pengadaan Mebel				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 unit	Satpol PP	30.000.000,00					
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 laporan	Satpol PP	175.000.000,00					
14	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Satpol PP	175.000.000,00					
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Satpol PP	175.000.000,00					
15	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 unit	Satpol PP	125.000.000,00					
17	7.01.01.2.09.08	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1 unit	Satpol PP	15.000.000,00					
18	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Satpol PP	35.000.000,00					

NO.	KODE	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	UP	B/L	Indikator Kinerja			Lokasi	APBD Kab. (Rp.)	APBD PROV		USULAN APBN		
					Output	Outcome	Target			SKPD Terkait	Pagu (Rp.)	KL	Rp.	0/TB/DAK
1		2					4	6	7		8	9	10	
	07:01:02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				Persentase pelanggaran Perda yang tertangani, Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terselesaikan dan persentase anggota Satlinmas yang terlatih	90%, 90% dan 30%	Satpol PP	4.433.000.000,00					
	7.01.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	Satpol PP	2.470.000.000,00					
19	7.01.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	120 kasus	Satpol PP	1.300.000.000,00					
20	7.01.02.2.01.02	Perindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Perindakan	184 kasus	Satpol PP	850.000.000,00					
21	7.01.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	Satpol PP	250.000.000,00					
22	7.01.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 dokumen	Satpol PP	300.000.000,00					
23	7.01.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuatan Hak Asasi Manusia				Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	360 orang	Satpol PP	600.000.000,00					

NO.	KODE	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	UP	B/L	Indikator Kinerja			Lokasi	APBD Kab. (Rp.)	APBD PROV		USULAN APBN		
					Output	Outcome	Target			SKPD Terkait	Pagu (Rp.)	KL	Rp.	D/TB/DAK
1		2					4	5	7		8	9	10	
24	7.01.02.2.01.06	Kerjasama antar Lembaga dan Mitra dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Mitra dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 dokumen	Satpol PP	100.000.000,00					
25	7.01.02.2.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Keterlibatan Umum				Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Keterlibatan Umum yang Tersedia	40 unit	Satpol PP	70.000.000,00					
	7.01.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				Jumlah Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 bulan	Satpol PP	943.000.000,00					
26	7.01.02.2.01.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12 laporan	Satpol PP	200.000.000,00					
27	7.01.02.2.01.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan	Satpol PP	300.000.000,00					
28	7.01.02.2.01.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 laporan	Satpol PP	463.000.000,00					
JUMLAH									12.937.528.338,00					

Mojokerto, Februari 2022
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRUSA
KABUPATEN MOJOKERTO

EDDY TAUFIQ, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19790804 196810 1 001

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 yang telah disusun merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada Tahun 2023 yang akan datang.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja guna mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Renja Satpol PP Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 adalah dokumen yang menjadi pedoman yang harus dilaksanakan oleh OPD guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto. Renja Satpol PP Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dilengkapi dengan Matriks Renja, yang berisi Program/Kegiatan, Capaian Program/Kegiatan/Hasil, Target, Lokasi, Kelompok Sasaran Kegiatan dan Pagu Indikatif. Harapan dari penuangan matriks tersebut adalah agar OPD dapat berjalan pada aturan perencanaan dan anggaran yang telah ditentukan.

Demikian Renja OPD ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

LAMPIRAN

